

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dan jajarannya serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh jajaran Perangkat Daerah.

Jawa Tengah ditetapkan sebagai sebuah provinsi secara administratif sesuai dengan Undang-Undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan jumlah kecamatan 576 dan 8.562 kelurahan/desa. Secara keseluruhan luas wilayah Jawa Tengah tahun 2020 adalah 32.800,69 km². Jumlah penduduk Jawa Tengah secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah 36.516.035 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Jawa Tengah merupakan provinsi di Pulau Jawa yang mendapatkan opini audit atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut sejak tahun 2011 hingga tahun 2020. Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai penghargaan Jawa Tengah sebagai pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya selama sepuluh kali berturut-turut (Bidang ikp Jawa Tengah, 2021).

Tabel 1.1
Opini Audit Hasil Pemeriksaan LKPD

Tahun	Provinsi		
	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat
2011	WTP	WTP-DPP	WTP
2012	WTP	WTP-DPP	WTP
2013	WTP	WTP-DPP	WTP
2014	WTP	WDP	WTP
2015	WTP	WTP	WTP
2016	WTP	WTP	WTP
2017	WTP	WTP	WTP
2018	WTP	WTP	WTP
2019	WTP	WTP	-
2020	WTP	WTP	-

Sumber: data yang telah diolah (2021)

Objek penelitian ini menggunakan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2017-2020. Alasan memilih kabupaten dan kota di Jawa Tengah karena Jawa Tengah selama sepuluh tahun berturut-turut mendapatkan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011-2020. Serta Jawa Tengah konsisten selama sepuluh tahun mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menunjukkan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan kepada pihak masyarakat publik. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Penggunaan *internet financial reporting* sebagai upaya Jawa Tengah untuk menunjukkan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan kepada masyarakat publik bahwa laporan keuangan Jawa Tengah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan bahwa badan publik atau pemerintah memiliki kewajiban untuk menerbitkan informasi mengenai informasi publik yang berada pada daerah kewenangannya kepada peminta

informasi publik tersebut, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik atau pemerintah wajib menyediakan informasi publik tersebut secara akurat, benar dan tidak menyesatkan. Informasi Publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh lembaga publik yang terkait dengan penyelenggaraan dan administrasi negara dan/atau penyelenggara dan pengurus lembaga publik informasi lain yang diatur dalam undang undang ini dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Saat ini masyarakat menuntut pelayanan publik untuk mampu memenuhi kepentingan masyarakat Indonesia, dapat diandalkan dan kredibel dalam jangkauan interaktif. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat bagi masyarakat, dan taat kepada tuntutan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas mengenai laporan keuangan dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai media termasuk juga internet, agar laporan keuangan dapat diakses oleh semua pihak (Saming et al., 2017). Pemerintah membangun serta mengembangkan situs resmi pemerintah guna memberikan informasi dan transparansi keuangan kepada masyarakat melalui *internet financial reporting*.

Internet financial reporting (IFR) merupakan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui *e-government* yang merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Tetapi sampai saat ini pengungkapan laporan keuangan tersebut lebih ke *voluntary disclosure* atau masih bersifat sukarela, karena dalam penerapannya tidak terdapat sanksi yang diberikan apabila pengungkapan tersebut tidak dipenuhi (Nosihana & Yaya, 2016).

Internet financial reporting penting karena untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan lebih banyak informasi mengenai anggaran

keuangan dan pertanggungjawaban kepada publik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat pada ketersediaan informasi dan kemudahan mendapatkan informasi tersebut, sehingga diperlukan pengungkapan laporan keuangan pada *website* yang dimiliki oleh pemerintah daerah. *Internet financial reporting* merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungannya dengan masyarakat karena pemerintah menyadari bahwa dalam melakukan pengelolaan atas keuangan daerah diperlukan hubungan pertanggungjawaban pemerintah sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal sesuai dengan teori keagenan (Prima & Verawaty, 2018). Teori keagenan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai prinsipal perlu terlibat dalam pengawasan terhadap kegiatan pemerintah sebagai agen. Masyarakat memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan selanjutnya pemerintah melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan daerah kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Khasanah et al., 2017).

Situs resmi pemerintah daerah yang terdapat pada internet memiliki informasi yang berkaitan dengan kondisi pemerintah daerah, termasuk memuat informasi mengenai kondisi keuangan suatu pemerintah daerah sebagai badan publik sebagai pengembangan *e-government*, hal tersebut dapat disebut sebagai *internet financial reporting* (IFR) (Saming et al., 2017). *Internet financial reporting* (IFR) merupakan bagian dari *e-government* yang dapat ditingkatkan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan pertanggungjawaban finansial untuk meningkatkan hubungannya dengan masyarakat (Prima & Verawaty, 2018).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2012 untuk pemerintah daerah memiliki menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) atau nama lainnya yang merujuk pada Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) pada *website* resmi milik pemerintah daerah.

Saat ini Kabupaten dan kota di Jawa Tengah seluruhnya sudah memiliki *website* resmi untuk memberikan informasi terkait dengan pemerintahan yang

dilaksanakan termasuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kenyataannya belum seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah melaksanakan *internet financial reporting* walaupun sudah memiliki *website* resmi sebagai wujud *e-government*. Sesuai data hasil pemeringkatan *e-government* Kabupaten dan Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, Kabupaten Sragen mendapatkan peringkat pertama dengan rating sangat baik (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2017). Walaupun mendapatkan rating sangat baik *website* resmi kabupaten Sragen tidak memiliki menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Serta Kabupaten Sragen dalam mengungkapkan laporan keuangan melalui *website* resminya tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Selanjutnya adalah berdasarkan data hasil pemeringkatan *e-government* Kabupaten dan kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Kabupaten Klaten mendapatkan peringkat 34 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan mendapatkan rating sangat kurang (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2017). Berbanding terbalik dengan Kabupaten Sragen, pada Kabupaten Klaten walaupun mendapatkan rating sangat kurang, Kabupaten Klaten sudah memiliki menu transparansi. Berikut merupakan data ketersediaan *menu* Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) pada Kabupaten dan kota di Jawa Tengah:

Tabel 1.2

Penerapan *Internet Financial Reporting*

No	Pemerintah Daerah	Memiliki Website	Memiliki Menu TPAD	Tidak Memiliki Menu TPAD
1	Kabupaten	29	14	15
2	Kota	6	3	3
Jumlah		35	17	18
Presentase		100%	49%	51%

Sumber: data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki menu TPAD (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) atau nama lainnya yang merujuk pada TPAD (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada situs resminya yaitu sebesar 51%. Sedangkan situs resmi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang sudah memiliki menu TPAD atau yang lainnya yang merujuk pada

TPAD adalah sebesar 49%. Artinya pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah masih beragam dan perlu ditingkatkan lagi. Walaupun situs resmi Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan menu TPAD pada situs resmi Pemerintah Jawa Tengah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *internet financial reporting*. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yakni ukuran pemerintah daerah, pendapatan perkapita, kekayaan daerah, dan opini audit (Mariani & Utami, 2019), kapasitas pemerintah daerah, *leverage*, jenis pemerintahan daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan opini audit (Idris et al., 2018), persaingan politik (Hadianto & Murtin, 2020), jenis pemerintahan dan kualitas audit (Kurniati & Siddi, 2020), kompetisi politik, kekayaan daerah dan akuntabilitas kinerja (Sofyani & Dwirama, 2019), aksesibilitas informasi keuangan (Yuhertiana et al., 2020), kemandirian keuangan pemerintah daerah daerah (Kurniawan & Scorpianti, 2019). Dalam penelitian peneliti akan menggunakan empat faktor yang pengaruhnya dalam setiap penelitian tidak konsisten yaitu ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, *leverage*, dan opini audit.

Faktor yang pertama akan dibahas adalah kekayaan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah mendeskripsikan tingkat kemakmuran suatu daerah, kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan menggunakan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri dimana pendapatan asli daerah tersebut menggambarkan kemandirian daerah tersebut (Mariani & Utami, 2019). Kekayaan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dapat dilihat pada nilai pendapatan asli daerah dari daerah tersebut, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut dan merupakan potensi dari daerah tersebut. Kekayaan daerah yang kecil akan menunjukkan kinerja pemerintah yang buruk, pemerintah daerah yang memiliki kinerja buruk akan cenderung menghindari pengungkapan dan akan membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan informasi keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan pengungkapan informasinya lebih baik yang sesuai dengan *teori signaling* dengan kata lain pemerintah akan

melakukan *internet financial reporting* dengan mudah apabila memiliki kinerja (Nosihana & Yaya, 2016). Kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin tinggi maka kemungkinan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah akan semakin tinggi (Nurhidayati & Rahayu, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kurniati & Siddi, 2020) dan (Sofyani & Dwirama, 2019) menunjukkan hasil bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *internet financial reporting*. Artinya nilai kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar maka tingkat *internet financial reporting* dari suatu daerah akan semakin tinggi. Sedangkan hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari (Mariani & Utami, 2019) dan (Hadianto & Murtin, 2020) menunjukkan hasil bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*, artinya besar kecilnya kekayaan daerah dari setiap daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *internet financial reporting*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *internet financial reporting (IFR)* adalah ukuran pemerintah daerah. Menurut (Hanafi & Wadi, 2021) total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menggambarkan ukuran pemerintah daerah, total aset yang dimiliki setiap daerah adalah tidak sama dimana hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan pada tingkat *internet financial reporting* pemerintah daerah. Ukuran pemerintah dapat dilihat dari nilai total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan menimbulkan rasa ingin tahu dari masyarakat terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah, ukuran pemerintah daerah dilihat dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apabila aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar akan tetapi tidak diikuti dengan penggunaan standar yang berlaku akan mengakibatkan pemda tidak berupaya untuk mengungkapkannya di *website* resmi pemerintah daerah (Hadianto & Murtin, 2020).

Ukuran pemerintah yang besar maka akan menunjukkan sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah daerah akan semakin ketat karena adanya kekhawatiran

penyalahgunaan dana oleh pemerintah daerah yang mungkin terjadi sehingga pemerintah sebisa mungkin akan melakukan pelaporan informasi keuangan kepada publik melalui *internet financial reporting* (Annisa & Murtini, 2018). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Mariani & Utami, 2019) dan penelitian (Hadianto & Murtin, 2020) ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *internet financial reporting*, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai ukuran pemerintah daerah semakin besar maka tingkat *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah akan semakin besar. Sedangkan penelitian (Hanafi & Wadi, 2021) berpendapat bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*, artinya besar kecilnya ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*.

Faktor ketiga adalah *leverage*, *leverage* adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjam untuk menyediakan layanan dan rencana program-program bagi masyarakat baik di masa kini atau di masa yang akan datang. Hubungan antara kreditur apabila nilai *leverage* semakin tinggi maka akan tinggi pengawasan kreditur terhadap debitur untuk melihat kemampuan pemanfaatan dana yang dipinjam dan tingkat kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjam (Nosihana & Yaya, 2016). *Leverage* adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan kepastian dana yang dipinjam dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, kreditur akan selalu mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan dana pinjaman dan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajibannya (Idris et al., 2018). *Leverage* terhadap *internet financial reporting* akan memberikan dorongan pemerintah daerah sebagai pemilik hutang untuk mempublikasikan laporan keuangannya lebih dominan dibandingkan dengan biaya, tekanan peraturan, dan politik. Dikarenakan pemberi hutang akan menuntut transparansi mengenai dan aksesibilitas yang paling mudah untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah (Prima & Verawaty, 2018)

Nilai *leverage* yang semakin kecil maka menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya melalui dana pemerintahan daerah itu sendiri. Berbanding terbalik apabila nilai *leverage* semakin besar maka menunjukkan pemerintah daerah tersebut belum mampu untuk

membiyai operasionalnya sendiri karena masih membutuhkan dana dari pihak lain (pemberi hutang). Sehingga nilai hutang akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah untuk melakukan *internet financial reporting*, dalam pengungkapannya pemerintah akan cenderung berhati-hati dikarenakan pemerintah daerah tidak ingin kinerjanya dianggap tidak baik karena hutang yang dimiliki. Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka *internet financial reporting* akan cenderung lebih rendah (Kurniawan & Scorpianti, 2019). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian (Hadianto & Murtin, 2020) *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *internet financial reporting*, artinya bahwa tingkat *leverage* dari pemerintah semakin *leverage* maka semakin rendah tingkat *internet financial reporting* dari pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian (Pontoh et al., 2018), (Idris et al., 2018), dan (Nosihana & Yaya, 2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*. Artinya bahwa nilai *leverage* yang dimiliki pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *internet financial reporting* yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Faktor keempat adalah opini audit BPK, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara opini merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan berdasarkan pada kriteria yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap aktivitas perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini audit BPK sesuai dengan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan pengecualian, Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan pendapat (TMP). Pendapat BPK mengenai LKPD akan mempengaruhi praktik *internet financial reporting* untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah mampu dan berkomitmen mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan SAP (Idris et al., 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diasumsikan bahwa terdapat

ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila memperoleh opini selain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diasumsikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum baik sehingga mengakibatkan kurangnya pengungkapan *internet financial reporting* yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kurniawan & Scorpianti, 2019). Sesuai dengan hasil penelitian (Sofyani & Dwirama, 2019) dan (Nor et al., 2019) menyatakan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap *internet financial reporting*, berdasarkan penelitian ini semakin baik opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi pula keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan *internet financial reporting* pada *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian (Idris et al., 2018) dan (Hadianto & Murtin, 2020) menyebutkan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*, hal tersebut berarti bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang, temuan fenomena yang telah diuraikan dan ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai *internet financial reporting*, kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan opini audit BPK, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, dan Opini Audit BPK terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan sarana publikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah, masyarakat dapat mengakses laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah hal tersebut merupakan wujud dari transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat. Informasi mengenai

laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah harus transparan dikarenakan *internet financial reporting* merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mengungkapkan laporan keuangan. *Internet financial reporting* kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pengungkapan laporan keuangan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat Kabupaten dan Kota yang belum memiliki menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai informasi yang seharusnya tersedia pada situs resmi masing-masing pemda belum tersedia, tidak semua situs resmi pemerintah mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan. Kabupaten Sragen mendapatkan pertama pertama dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan rating sangat baik tidak memiliki menu transparansi sedangkan pada Kabupaten Klaten yang mendapatkan peringkat 34 dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan mendapatkan rating sangat kurang sudah memiliki menu transparansi.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan dalam perumusan masalah, maka terdapat pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Opini audit BPK, dan *Internet Financial Reporting* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020?
2. Bagaimana Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, dan Opini audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020?
3. Bagaimana Kekayaan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020?
4. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020?
5. Bagaimana *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020?

6. Bagaimana Opini audit BPK secara parsial berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Opini audit BPK, dan *Internet Financial Reporting* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, dan Opini audit BPK terhadap *Internet Financial Reporting* Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kekayaan Daerah terhadap *Internet Financial Reporting* Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Internet Financial Reporting* Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap *Internet Financial Reporting* Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Opini audit BPK terhadap *Internet Financial Reporting* Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk yang membacanya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan mengenai kekayaan daerah, ukuran pemerintahan, *leverage*, opini audit BPK, dan *internet financial reporting*.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan mengenai mengenai kekayaan daerah, ukuran pemerintahan, *leverage*, opini audit BPK, dan *internet financial reporting*. Serta penelitian ini digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh mengenai kekayaan daerah, ukuran pemerintahan, *leverage*, dan opini audit BPK terhadap *internet financial reporting*

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi pengguna informasi/publik

Hasil penelitian dapat digunakan untuk tambahan informasi mengenai mengenai kekayaan daerah, ukuran pemerintahan, *leverage*, opini audit BPK, dan *internet financial reporting* di kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi pemerintah daerah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dapat mengatasi masalah yang ada di daerahnya dan mengetahui hal apa saja yang dapat ditingkatkan pada pengelolaan keuangan daerah dan penelitian ini diharapkan mampu memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan *internet financial reporting* melalui situs resmi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini maka peneliti mengemukakan garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian mengenai fenomena yang akan diangkat menjadi tema yang penting maka pantas untuk diteliti berdasarkan pendapat dari teori serta fakta-fakta yang ada, perumusan masalah berdasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir yang menjelaskan gambaran masing-masing bab dalam penelitian secara ringkas.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori dari umum ke khusus yang berkaitan dengan penelitian ini, disertai dengan penelitian terdahulu sebagai sumber referensi penelitian ini, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai suatu yang berkaitan dengan pendekatan penelitian, metode penelitian, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan untuk menjawab masalah pada penelitian. Bab ini berisi tentang menguraikan jenis Penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan metode Teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang diuraikan secara sistematis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini terdapat dua bagian; yang pertama adalah menyajikan hasil penelitian, yang kedua adalah pembahasan dari hasil penelitian dengan mencakup analisis data dan analisis pengaruh antar

variabel serta perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu dengan landasan teori yang sesuai.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab yang menjelaskan mengenai penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang menjawab semua pertanyaan dan hipotesis yang ada. Serta saran peneliti berkaitan dengan manfaat penelitian baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.